

Pandangan Kepala Desa Serta Implementasi Desa Kayu Kebek Terhadap Sdg's Desa Ke- 8

Ahmad Feryan Perwira Yudha¹, Havidz Ageng Prakoso², Agus Hari Wibawa³

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: feryanyudha111@webmail.umm.ac.id¹, havidz@umm.ac.id², bowoayahgale@gmail.com³

Abstrak

Arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan faktor berkelanjutan pada semua sektor, termasuk pariwisata. Pengembangan desa wisata yang bersifat mengarusutamakan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu manifestasi arah kebijakan tersebut. Dibutuhkan langkah yang berkesinambungan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan pandangan Kepala Desa Kayu Kebek dalam penerapan SDG's Desa Ke- 8 serta implementasi kebijakan serta program Desa Kayu Kebek terhadap SDG's Desa Ke- 8. Untuk mengelaborasi hal tersebut, studi ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*) dengan pendekatan Intermestik, Triple Bottom Line (TBL) dan Sustainable Development Goals (SDG's). Data primer didapatkan dari observasi baik langsung (lapangan) dengan wawancara serta menyebarkan kuesioner. Sedangkan data sekunder di dapatkan dari laporan tahunan dari institusi terkait dan berasal dari buku, jurnal, artikel dan peraturan perundangan-undangan yang dipergunakan untuk mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. *Pertama*, Pandangan Kepala Desa Kayu Kebek Terhadap SDG's Ke- 8 yang progresif menjadi modal utama dalam mendorong pencapaian SDG's Desa Ke- 8, *Kedua*, Implementasi Desa Kayu Kebek Terhadap SDG's Desa Ke- 8 sudah berperan aktif dan baik dengan penguatan sinergitas antara Pemerintah Desa dan semua elemen masyarakat yang lebih menyeluruh untuk mencapai cita-cita dan tujuan SDG's Ke- 8 di kalangan masyarakat desa.

Kata Kunci: Desa Kayu Kebek, Desa Wisata, Intermestik, Kabupaten Pasuruan, SDG's Desa, Triple Bottom Line (TBL).

Abstract

The direction of national development policy emphasizes sustainable factors in all sectors, including tourism. The development of tourism villages that mainstream community empowerment and active participation is one manifestation of this policy direction. Sustainable steps are needed in order to find solutions to these problems. This study aims to find out, understand, and explain the views of the Head of Kayu Kebek Village on the implementation of the 8th Village SDG's as well as the implementation of Kayu Kebek Village policies and programs towards the 8th Village SDG's. To elaborate on this, this study uses mixed methods research with the Intermestic, Triple Bottom Line (TBL) and Sustainable Development Goals (SDG's) approaches. Primary data is obtained from direct observation (field) with interviews and distributing questionnaires. While secondary data is obtained from annual reports from related institutions and comes from books, journals, articles and laws and regulations that are used to elaborate and answer the research problems raised. The research results show two things. First, the progressive view of the Kayu Kebek Village Head towards the 8th SDG's is the main capital in encouraging the achievement of the 8th Village SDG's, Second, the Implementation of Kayu Kebek Village towards the 8th Village SDG's has played an active and good role by strengthening the synergy between the Village Government and all

elements of society more thoroughly to achieve the ideals and goals of the 8th SDG's among the village community.

Keywords: *Kayu Kebek Village, Tourism Village, Intermestic, Pasuruan Regency, Village SDG's, Triple Bottom Line (TBL).*

PENDAHULUAN

Desa Kayu Kebek merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Desa ini memiliki perkiraan luas wilayah 9.5 km² dengan jumlah penduduk 3.668 jiwa (Fasa et al., 2022; Mumtaz & Karmilah, 2022). Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa ini adalah petani apel dan sayuran. Potensi desa yang dapat dikembangkan adalah wisata dan ekonomi pasar, namun sayangnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari segi infrastruktur, kondisi jalan pada desa ini kurang memadai dan kurang memperhatikan keselamatan. Selain itu, kondisi infrastruktur lainnya seperti penerangan, sanitasi, fasilitas pendidikan, dll (Ma'ruf et al., 2018). Keadaan ini tentu menghambat mobilitas dan aktivitas masyarakat desa untuk memajukan ekonomi dan pengetahuan masyarakat desa. Secara sosial budaya, masyarakat desa Kayu Kebek masih memegang erat adat istiadat dan tradisi keagamaan Masyarakat setempat Dalam aspek religi, mayoritas penduduk desa memeluk agama Hindu dan Islam. Dengan keadaan Masyarakat yang menjunjung tinggi gotong- royong dan hubungan antar masyarakat dan warga yang sangat erat (Muljanto, 2021). Dengan keindahan alam yang memukau serta kearifan lokal yang kental, desa ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Namun, untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan, penting untuk merumuskan strategi yang mengakomodasi semua stakeholder (Kemendes PDTT, 2020). Melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya adalah langkah-langkah krusial yang perlu dilakukan (Anggraini, 2021; Giampiccoli & Kalis, 2012). Dikarenakan tujuan dari program pengembangan pariwisata pedesaan lebih dari sekedar mendorong masyarakat pedesaan untuk secara kreatif mengelola sumber daya alam dan budaya mereka untuk keuntungan ekonomi. Hal ini juga melibatkan penyiapan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk bersaing dalam skala global (Ma'ruf et al., 2018). Tujuan utama pengembangan wisata pedesaan adalah untuk menumbuhkan ketahanan budaya dan ekonomi dalam masyarakat pedesaan (Rahmawati, 2021). Dengan menyediakan dukungan ekonomi dan sumber daya memadai, masyarakat yang bergabung dalam kelompok sadar wisata dapat melestarikan dan meningkatkan warisan budaya desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa, kepala desa mempunyai hak dan tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, menjaga lingkungan, serta mengelola keuangan dan aset desa. Selain itu, kepala desa juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan melakukan pembangunan untuk kesejahteraan warga. Dalam uraiannya, kepala desa mendapat dukungan

dari organisasi di bawah struktur pemerintahan desa. Sesuai Pasal 87 Undang-Undang Desa, terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertanggung jawab mengelola usaha di bidang ekonomi dan pelayanan publik, mengikuti peraturan yang berlaku. BUMDes diharapkan dapat mengelola pengembangan desa wisata secara efektif dengan menerapkan manajemen yang baik. Dengan demikian, pemerintah desa tidak lagi bergantung pada pemodal dalam pengelolaan dan pembangunan Desa Wisata Kayu Kebek, karena BUMDes Desa Kayu Kebek berfungsi sebagai pengelola utama untuk wisata yang ada di Kayu Kebek. Adapun pemerintah Desa memiliki peran penting dalam merancang program inovasi, khususnya dalam bidang pariwisata. Pengembangan inovasi pariwisata di Desa Sekapuk memberikan solusi baru untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dari konsep Triple Bottom Line (TBL), dapat dilihat bahwa sektor publik di Desa Kayu Kebek mampu menciptakan hubungan baru dan meningkatkan keterlibatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan Desa Wisata Kayu Kebek sebagai destinasi pariwisata pertama menjadi solusi untuk berbagai tantangan sekaligus menunjukkan bahwa Desa Kayu Kebek mempunyai potensi yang dapat dikembangkan (Atmoko, 2021).

Melalui penerapan TBL, Kayu Kebek diharapkan tidak hanya menjadi tempat wisata yang menarik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Aspek ekonomi yang dikembangkan dengan bijaksana akan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan tambahan bagi penduduk. Sementara itu, fokus pada aspek lingkungan akan membantu menjaga keindahan alam dan kelestarian budaya yang ada (Sachs, 2015; UNWTO, 2007). Dengan demikian, implementasi konsep Triple Bottom Line bukan hanya sekadar konsep, melainkan sebuah langkah nyata untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi semua pihak (Elkington, 1994; Alhaddi, 2015).

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pembangunan berkelanjutan telah mendapatkan daya tarik yang signifikan, khususnya di bidang pariwisata. Pergeseran paradigma ini menggarisbawahi perlunya pariwisata pariwisata yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesetaraan sosial dan lingkungan. Kerangka kerja Triple Bottom Line (TBL), yang menekankan integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan, memberikan pendekatan holistik untuk mengatasi kompleksitas pengembangan pariwisata. Di Desa Kayu Kebek, yang terletak di Kecamatan Tukur, Kabupaten Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, pendekatan ini sangat relevan, karena daerah ini kaya akan sumber daya alam dan warisan budaya. sumber daya alam dan warisan budaya. Dengan mengeksplorasi potensi pariwisata berbasis TBL, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap strategi dan manfaat penerapan praktik-praktik berkelanjutan yang dapat meningkatkan kelangsungan ekonomi desa sekaligus melestarikan lanskap ekologi dan budayanya yang unik. lanskap ekologi dan budayanya yang unik. Pada akhirnya, tujuannya

adalah untuk membangun model berkelanjutan yang dapat yang dapat direplikasi di komunitas serupa (Burns, 1999; Morrison, 2013).

Penelitian ini menarik untuk dikaji dikarenakan dalam topik ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam hal ini berani keluar dari zona aman dan nyaman mereka dengan menggunakan konsep Triple Bottom Line dapat digunakan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs. Kajian ini sendiri juga akan mengulik lebih dalam mengenai konsep Triple Bottom Line (TBL) dan korelasinya di bidang pariwisata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*) dengan menggunakan kerangka pikiran kerja induktif dan juga deduktif, dimana nantinya jawaban atas pandangan objek sample dapat diprediksikan. Dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil desain studi kasus terkait fenomena yang diteliti serta untuk memperkuat analisis penelitian, Maka dibutuhkan keberagaman metode sebagai cara untuk memahami realita sebanyak-banyaknya. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek penting yang dapat memiliki pengaruh besar pada pengembangan desa wisata berbasis triple bottom line di Kayu Kebek, yaitu *People*, *Planet* dan *Profit*. Selain itu, pendekatan ini berguna untuk untuk memahami faktor situasional, internal dan analisis eksternal.

Data primer didapatkan dari teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini dipakai untuk mendapatkan subjek penelitian sesuai dengan fokus penelitian, yaitu dengan cara observasi baik langsung (lapangan) dan wawancara dengan kriteria subjek yang terlibat dalam pembangunan Desa Wisata Kayu Kebek. Berikut terdapat enam subjek penelitian yang terlibat dalam pembangunan wisata Desa Kayu Kebek: 1.) H. Alif Wari Yuda S.E., selaku Kepala Desa Kayu Kebek; 2.) Drs. Agus Hari Wibawa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan; 3.) Agus Setiya Wardana selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan; 4.) Ir. Lilik Widji Asri, M.MA.; 5.) H. Taufiqul Ghony, SE., Msi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Serta menyebarkan kuesioner kepada seluruh kelompok instrumen masyarakat Desa Kayu Kebek yang digunakan untuk sample dalam penelitian kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bumi Areta Hijau, Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK dan Kader di Desa Kayu Kebek sekitar ± 20 orang tiap kelompok elemen masyarakat Kayu Kebek.

Sedangkan data sekunder di dapatkan dari laporan tahunan dari institusi terkait dan berasal dari buku, jurnal, artikel dan peraturan perundangan-undangan yang dipergunakan untuk mengelaborasi dan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat, yaitu Pandangan serta Implementasi Desa Kayu Kebek terhadap SDG's Desa ke- 8.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sehingga diperoleh data penelitian yang utuh. Aktivitas dalam analisis data adalah dengan cara mereduksi data wawancara dengan subjek penelitian serta mengkolerasikan data yang diperoleh dari hasil kuisiner kepada tiap kelompok penggerak di Desa Kayu Kebek terkait bagaimana desa punya pandangan terkait pembangunan berkelanjutan serta mengimplementasikan nilai-nilai global. Penyajian data dalam bentuk narasi serta memaparkan data hasil kuesioner, terkait pemerintah desa dengan seluruh kelompok instrumen masyarakat desa sebagai aktor utama pembangunan serta OPD dan DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai aktor pendukung aktif dalam mengimplementasikan SDG's Desa Ke-8 dan nilai-nilai global dalam pembangunan Desa Wisata Kayu Kebek. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Kepala Desa Kayu Kebek Terhadap SDG's Desa Ke-8

Desa wisata berfungsi sebagai jalan penting untuk pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan SDG's Desa Ke- 8, yang menekankan pada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Di Desa Kayu Kebek, bentuk pariwisata ini muncul sebagai sarana untuk merangsang ekonomi lokal sambil mempromosikan karakteristik budaya dan lingkungan yang unik di daerah tersebut. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan seperti Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian dan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan mengakui potensi pariwisata desa yang ada di Desa Kayu Kebek untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menumbuhkan inisiatif kewirausahaan di antara penduduk. Selain itu, upaya-upaya ini berkontribusi pada diversifikasi ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada pertanian tradisional dan mempromosikan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Wawancara dengan para pemimpin lokal mengungkapkan komitmen kolektif untuk memanfaatkan potensi pariwisata sambil memastikan bahwa hal tersebut selaras dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mewujudkan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam SDG's Desa Ke- 8.

Terlihat jelas pada proses pemerintah desa dalam melakukan pembangunan Desa Wisata Kayu Kebek. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa H. Alif Wari Yuda, S.E., pada saat terpilih menjadi kepala desa, Bapak H. Alif Wari Yuda, S.E., berfokus pada pembangunan wisata Kayu Kebek yang memiliki wisata unggulan seperti Air Terjun Coban Waru, Pemandian Sendang Sri, Wisata Petik Apel dan masih banyak lagi yang belum dieksplorasi secara maksimal. Bapak H. Alif Wari Yuda, S.E., menuturkan bahwasannya pada saat pertama kali menjadi sebagai kepala desa punya cita-cita membuat wisata dengan tujuan membuka lapangan kerja bagi masyarakat

Desa Kayu Kebek terutama para pemuda Karang Taruna dengan harapan besar menjadi masyarakat yang berkarakter. Adapun cita-cita menjadikan wisata-wisata yang ada di Desa Kayu Kebek menjadi terkenal hingga didatangi wisatawan asing dan menjadi bagian dari organisasi internasional merupakan sebuah keberkahan yang harus disyukuri didapat oleh Desa Kayu kebek.

Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Bapak H. Alif Wari Yuda, S.E., sebagai salah satu inisiator pembangunan Desa Wisata Kayu Kebek sebagai berikut:

“Saya ingin membangun sebuah desa wisata namun bukan desa wisata biasa, melainkan saya ingin membangun wajah baru desa wisata yang berkarakter. Dengan cara, kita persamakan persepsi, pemikiran serta visi dan misi. Bukan hanya saya saja melainkan seluruh pemerintah desa serta masyarakat Kayu Kebek dan juga langkah ini sebagai langkah kecil perubahan yang selaras akan cita-cita juga dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkhususnya cita-cita dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Bapak Drs. Agus Hari Wibawa. Dengan langkah kami yang memasukkan pembangunan kepariwisataan sebagai hal utama dalam RPJMDes Desa Kayu Kebek yang mengambil nilai SDG's Desa dan mengimplementasikan nilai-nilai global ke dalam pembangunan Desa Wisata Kayu Kebek. Kalau kita bicara SDG's itu sendiri, terutama tujuan ke- 8, maka indikator keberhasilannya bukan seberapa banyak wisatawan yang akan datang nantinya, melainkan seberapa banyak warga desa yang penghasilannya meningkat dan yang ikut berperan dalam kegiatan itu. Pemerintah Desa Kayu Kebek telah mulai mendorong pembentukan kelembagaan wisata seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelatihan UMKM lokal serta perencanaan pengelolaan destinasi melalui BUMDes. Dikarenakan kami di desa tidak ingin menjadi penonton saja. Namun betul-betul kami ingin SDG's desa ke- 8 dapat dirasakan terutama dalam bentuk peningkatan ekonomi warga yang adil dan merata. Dan serta satu prinsip kami dalam hal ini ialah Kalau desa bergerak bersama, SDG's bukanlah sesuatu yang jauh, itu semua bisa kita wujudkan dari bawa bersama-sama.” (wawancara, 14 April 2025).

Selama Proses pembangunan Desa Wisata Kayu Kebek pemerintah desa Kayu Kebek juga membuat anggaran pendukung dan perbaikan infrastruktur pariwisata dalam RPJM Desa. Pemerintah desa Kayu Kebek memasukkan beberapa hal penting dalam RPJM Desa terutama dalam bidang pariwisata, perindustrian dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga serta UMKM dan koperasi. Serta Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan melakukan ekspansi besar-besaran agar terwujudnya cita-cita dari Bapak Drs. Agus Hari Wibawa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan serta selaku inovator penerapan Konsep Triple Bottom Line dalam pembangunan Desa Wisata di Kayu Kebek. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Saya dari dulu selalu bertanya-tanya mengapa Kabupaten Pasuruan yang istilahnya berada di wilayah Tapal Kuda, dimana berada di wilayah strategis

bisa mati dan tidak bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk dijadikan destinasi wisata. Kita ambil contoh kecil Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar dan Kota ataupun Kabupaten yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil bisa memanfaatkan serta mencari celah untuk maju. Sedangkan kita di Kabupaten Pasuruan ini kaya kenapa tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Itulah yang menjadi cikal bakal cita-cita saya untuk memajukan Kabupaten Pasuruan terutama dalam hal pariwisata. Maka dari itu, pertama kali saya menjabat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan saya menginisiasikan untuk menggunakan Konsep Triple Bottom Line ini dalam Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Pasuruan. Karena apa? Dikarenakan kita harus memperhatikan mulai dari aspek besar yang kentara sampai aspek kecil yang tidak terlihat harus kita perhatikan. Terutama kita mengedepankan pada poin SDG's Desa ke-8 mengenai Pekerjaan yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi lokal. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terutama Dinas Pariwisata terus melakukan evaluasi bulanan terhadap Desa Kayu Kebek serta selalu menekankan untuk menerapkan nilai-nilai global terutama pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDG's Desa. Dikarenakan proyeksi nantinya Desa Wisata Kayu Kebek menjadi salah satu destinasi andalan Kabupaten Pasuruan dikarenakan posisinya berada di jalan utama menuju Gunung Bromo melalui jalur Pasuruan. Perlu diingat bahwasannya indikator keberhasilan desa wisata bukanlah diukur dari kemegahan fasilitas dari desa wisata tersebut, tetapi dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dan memperoleh manfaat langsung dari aktivitas wisata tersebut. Dikarenakan banyak desa punya potensi, tapi yang membedakan ialah bagaimana desa itu bisa mengelola potensi yang ada menjadi produk wisata yang mempunyai nilai ekonomi, oleh karena itu model kolaboratif dan kooperatif sangat kami dorong, misalnya melalui BUMDes, Ibu-Ibu PKK, Kader, Pokdarwis hingga Karang Taruna karena kami tidak ingin pembangunan hanya dinikmati oleh satu-dua pihak saja. Maka dari itu, saya Drs. Agus Hari Wibawa selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan siap mendukung Desa Kayu Kebek maju melalui pariwisata yang berasaskan SDG's Desa Ke- 8 serta nilai-nilai global, guna menciptakan Desa Wisata yang dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat terkhususnya masyarakat Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan.” (wawancara, 17 April 2025)

Pengembangan Desa Wisata, khususnya di daerah seperti Kayu Kebek, membutuhkan pendekatan multifaset yang melibatkan keterlibatan masyarakat dan praktik-praktik yang berkelanjutan. Para pemimpin dari berbagai sektor mengakui bahwa memberdayakan masyarakat lokal sangat penting untuk mendorong kemandirian dan kemakmuran ekonomi, seperti yang ditekankan oleh perlunya memanfaatkan sumber daya masyarakat secara efektif.. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam menciptakan kemandirian di dalam desa-desa wisata, yang kemudian mengarah pada peningkatan peluang pendapatan dan pengurangan pengangguran. Selain itu, mengintegrasikan praktik pertanian lokal ke dalam pengembangan pariwisata dapat

meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang diilustrasikan oleh temuan di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, di mana para petani mendapatkan manfaat dari kolaborasi sinergis untuk memasarkan produk khas. Dengan demikian, wawasan gabungan dari para pemimpin lokal mengungkapkan visi bersama tentang pariwisata sebagai katalisator untuk pembangunan berkelanjutan, selaras dengan cita-cita yang ditetapkan dalam SDG's Desa Ke- 8.

Maka dari itu, hal ini mendapat dukungan langsung dari Ibu Ir. Lilik Widji Asri, M.MA., selaku Kepala Dinas Pertanian beliau menyampaikan bahwasannya pengembangan desa wisata tidak hanya terbatas pada sektor budaya atau alam, tetapi juga sangat relevan jika dikembangkan dari potensi pertanian lokal. Ditambah juga potensi pertanian di Desa Kayu Kebek dapat dijadikan objek agrowisata yang bisa meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan sekaligus membuka peluang kerja serta usaha baru bagi masyarakat desa. Dimana hal ini dituturkan beliau sebagai berikut:

“Pasuruan ini kaya akan potensi terutama dalam bidang holtikultura, kopi dan buah-buahan tropis. Jikalau potensi itu dikemas dan terkonsep dengan baik itu bisa menjadi ekonomi yang luar biasa. Dikarenakan dari kami sendiri ingin SDG's bukan hanya sebagai jargon dan omon-omon saja. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi desa, maka sektor pertanian harus menjadi penggerak utama terutama bila hal itu dibungkus dalam konsep desa wisata seperti apa yang dicita-citakan oleh Bapak Drs. Agus Hari Wibawa. Ini bukan sekedar meningkatkan pendapatan saja tetapi juga membangun kebanggaan masyarakat terkhususnya masyarakat Desa Kayu Kebek terhadap potensi desanya sendiri.” (wawancara, 17 April 2025)

Dalam konteks Desa Kayu Kebek, implementasi SDG's Desa Ke- 8 sangat penting untuk mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai dan sumber daya lokal. Aset budaya dan ekologi desa yang berbeda dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan menumbuhkan peluang ekonomi sambil memastikan kelestarian lingkungan. keberlanjutan lingkungan. Dengan mengedepankan pendekatan Triple Bottom Line, yang mengevaluasi keberhasilan sosial, lingkungan, dan ekonomi, Desa Kayu Kebek dapat secara efektif menyelaraskan strategi pembangunannya dengan komitmen global yang lebih luas terhadap SDG's, sehingga berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan bagi penduduk dan planet ini secara keseluruhan.

Desain pembangunan desa wisata perlu diarahkan tidak hanya sebagai sarana promosi budaya dan alam desa, tetapi juga sebagai strategi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam konteks SDG's Desa Ke- 8 sangat penting agar setiap inisiatif desa wisata mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dan mengurangi ketimpangan penghasilan di desa. Bapak Agus Setiya Wardana selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan menuturkan bahwa:

“Desa wisata itu bukan hanya sekedar tempat selfie atau event musiman. Kalau hal ini dikelola dengan serius, desa wisata bisa jadi penggerak utama ekonomi desa. Serta perlu diingat juga pengimplementasian SDG's Desa harus kontekstual dan terintegrasi dalam RPJMDes serta APBDes, guna dapat mengembangkan pembangunan menuju desa wisata contohnya dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, sanitasi dan digitalisasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menguatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, seperti pelatihan hospitality, manajemen UMKM dan digital marketing, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja tetapi juga menjadi pelaku aktif dan pemilik manfaat dari sektor desa wisata. Dalam artian, kita ingin ekonomi tumbuh, kita harus tumbuh dari bawah dan tumbuh bersama serta saya Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan mewakili anggota komisi 2 serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan berkomitmen dalam mendukung Desa Kayu Kebek menjadi Desa Wisata dan akan terus diarahkan pada prinsip keberlanjutan dan pemerataan manfaat serta siap untuk menjembatani kemitraan antara desa, pelaku usaha dan pemerintah daerah guna memperkuat ekosistem desa yang berbasis wisata.” (wawancara. 28 April 2025)

Dalam konteks masyarakat lokal dan inisiatif pariwisata, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk mendorong praktik-praktik berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan lingkungan di area-area ini. Dengan menerapkan tujuan-tujuan ini, desa-desa wisata seperti Kayu Kebek dapat mengatasi tantangan-tantangan lokal sekaligus mempromosikan keterlibatan wisatawan yang bertanggung jawab. Penerapan pendekatan Triple Bottom Line yang memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, sangat relevan dalam hal ini. Sebagai contoh, keberhasilan implementasi program pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh PT Pertamina Gas Operation Kalimantan Area di Balikpapan, menggambarkan bagaimana inisiatif yang ditargetkan dapat merangsang ekowisata lokal dan mengatasi masalah masyarakat secara simultan. secara simultan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup. Demikian pula, penelitian mengindikasikan bahwa pengelolaan desa wisata yang efektif dapat mencerminkan prinsip-prinsip Triple Bottom Line, yang selaras dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan integritas lingkungan.

Dalam menerapkan pendekatan Triple Bottom Line, Desa Kayu Kebek mencontohkan yang harmonis antara keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam strategi pengembangan pariwisatanya. strategi pengembangan pariwisatanya. Desa ini memprioritaskan kesetaraan sosial dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara warga. dan tanggung jawab kolektif di antara warga. Dari sisi lingkungan, desa ini menerapkan praktik-praktik yang meminimalkan ekologis, seperti

mempromosikan pariwisata ramah lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati lokal, yang berkontribusi pada habitat alam yang lebih berkelanjutan. Secara ekonomi, Kayu Kebek meningkatkan keuangan dengan mendorong kewirausahaan lokal dan pemerataan distribusi pendapatan dari kegiatan pariwisata, yang secara langsung memberikan manfaat bagi anggota masyarakat. Pendekatan multidimensi ini multidimensi ini tidak hanya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) tetapi juga mencerminkan nilai-nilai global tentang kehidupan yang berkelanjutan, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pariwisata berkelanjutan yang kuat untuk pariwisata berkelanjutan yang dapat menjadi model bagi komunitas lain.

Hal ini mendapat sorotan juga dari Bapak H. Taufiqul Ghony, SE., Msi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dimana pengembangan Desa Kayu Kebek menjadi Desa Wisata Berbasis Triple Bottom Line dari sisi lingkungan, beliau menuturkan:

“Saya setuju dengan apa yang ide serta konsep yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata terkait pengembangan desa wisata Kayu Kebek yang berbasis Triple Bottom Line, dikarenakan pengembangan desa wisata tidak boleh semata-mata berorientasi ekonomi, melainkan harus berjalan beriringan dengan kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi desa dalam konteks SDG's Ke-8, maka yang harus kita tekankan adalah keseimbangan antara pertumbuhan dan berkelanjutan. Dan juga kami dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan mendorong lahirnya desa wisata berbasis ekowisata, dimana desa wisata yang mengedepankan konversi alam, pelibatan komunitas lokal dan edukasi lingkungan. Karena kita dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak ingin desa wisata yang jangka pendek dan eksploitatif. Kita ingin desa wisata yang membangun kesadaran, memberi manfaat ekonomi tapi tetap menjaga warisan lingkungan untuk generasi berikutnya. Dan kami siap bersinergi terkhususnya dengan Desa Kayu Kebek dan Dinas Pariwisata untuk menciptakan model desa wisata dan yang ekonominya tumbuh, lingkungannya lestari dan manfaatnya dapat dirasakan semua kalangan sebagaimana semangat utama dari SDG's Desa Ke- 8.” (wawancara, 8 Mei 2025)

Pengembangan pariwisata, khususnya di daerah seperti Desa Kayu Kebek, menghadirkan dampak multi dampak multi-segi yang ditandai dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, pariwisata dapat meningkatkan pendapatan lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan barang dan jasa, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Namun, pertumbuhan ini harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan kerentanan jika permintaan pariwisata berfluktuasi. Secara sosial, pariwisata dapat mempromosikan pertukaran budaya dan kohesi masyarakat tetapi juga dapat

tantangan, seperti melunturnya tradisi lokal dan meningkatnya biaya hidup bagi penduduk lokal. Secara lingkungan, pariwisata dapat mendorong upaya konservasi dengan meningkatkan kesadaran akan ekosistem lokal, meskipun juga berisiko degradasi karena peningkatan lalu lintas pejalan kaki dan sampah. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang yang menggabungkan prinsip-prinsip Triple Bottom Line sangat penting untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Kayu Kebek.

Analisis terhadap Desa Kayu Kebek menunjukkan keberhasilan penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), terutama melalui penekanannya pada kesetaraan sosial, kelangsungan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, yang merupakan contoh dari pendekatan Triple Bottom Line. Temuan menunjukkan bahwa inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat tidak hanya meningkatkan pariwisata lokal tetapi juga mendorong pelestarian budaya dan memberdayakan penduduk dengan mempromosikan model bagi masyarakat pedesaan serupa yang menginginkan pembangunan berkelanjutan. Kedepan, implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa mengadopsi metode partisipatif partisipatif dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dapat kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pelajaran yang diperoleh dari Desa Kayu Kebek menawarkan wawasan berharga bagi masyarakat lain yang ingin menyeimbangkan pembangunan dengan ekologi dan tanggung jawab sosial, mendorong adopsi yang lebih luas dari prinsip-prinsip ini dalam konteks yang serupa. Pendekatan semacam itu dapat mengkatalisasi pergeseran transformatif menuju ekonomi pedesaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan secara global.

Implementasi Desa Kayu Kebek Terhadap SDG's Desa Ke-8

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman serta implementasi seluruh elemen kelompok masyarakat Desa Kayu Kebek terhadap SDG's Desa Ke- 8, yaitu "Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan", serta nantinya bisa dilihat sejauh mana juga pemahaman mereka atas SDG's Desa Ke- 8 diimplementasikan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan. Kuesioner yang disusun berisi sejumlah 10 pertanyaan yang mengukur tingkat pemahaman seluruh elemen kelompok masyarakat terhadap konsep SDG's Desa Ke- 8 yang dimana mencakup peningkatan produktivitas ekonomi serta inklusivitas pembangunan ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata. Adapun, kuesioner ini juga menggali pengetahuan responden mengenai peran pemerintah desa terutama kepala desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta upaya konkret yang telah dilakukan dalam mendukung tujuan tersebut.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 83 orang (59,30%) responden perempuan dan jumlah responden berjenis laki-laki sebanyak 57 orang (40,70%) dari total 140 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat dipenelitian ini

dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki dan hanya selisih 26 orang atau 18,57% responden. Namun demikian, data dari kuesioner dapat dikatakan “sah” dikarenakan komposisi antara laki-laki dan perempuan yang bergabung dalam keanggotaan dari setiap organisasi lebih dominan perempuan terutama dalam organisasi PKK dan juga Kader.

Berdasarkan kelompok usia, dari 140 usia responden terdapat 2 (dua) kelompok usia yang mendominasi adalah responden yang berusia 17 tahun yaitu sebanyak 34 orang (24,29%) responden dan responden yang berusia 18 tahun yaitu sebanyak 20 orang (14,29%). Komposisi kelompok responden dengan usia 20 tahun sebanyak 8 orang (5,71%) disusul usia 19 tahun dan 21 tahun sebanyak 7 orang (5%). Kemudian usia 47 tahun sebanyak 5 orang (3,57%) dan masing-masing sebanyak 4 orang di usia 23 tahun, 31 tahun, 37 tahun dan 39 tahun. Sementara itu, usia responden 24 tahun, 27 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan 55 tahun sebanyak 3 orang (2,14%). Adapun yaitu usia 22 tahun, 25 tahun, 28 tahun, 29 tahun, 32 tahun, 35 tahun, 42 tahun dan 43 tahun masing-masing sebanyak 2 orang (1,43%) dan terakhir masing-masing 1 orang (0,71%) di usia 26 tahun, 41 tahun, 44 tahun, 45 tahun, 46 tahun, 48 tahun, 50 tahun, 56 tahun dan 65 tahun dari total responden.

Berdasarkan kelompok organisasi responden desa, responden yang bergabung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) unggul sebanyak 33 orang (23,60%), kemudian disusul responden yang bergabung pada organisasi Kader dan Karang Taruna yang seimbang sebanyak 32 orang (22,90%). Adapun disusul responden dari Ibu-Ibu PKK sebanyak 23 orang (16,40%) dan responden yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bumi Areta Hijau sebanyak 20 orang (14,30%) dari semua total responden sebanyak 140 orang.

Hasil dari pengisian kuesioner dianalisis untuk melihat pola pemahaman responden terhadap SDG's Desa Ke- 8, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi yang mungkin ada. Temuan dari kuesioner ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana SDG's Desa khususnya pada tujuan Ke- 8 dikenal serta diimplementasikan dalam praktek pembangunan di Desa Kayu Kebek. Berdasarkan hasil pengelolaan data dari 140 responden yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bumi Areta Hijau, Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK dan Kader di Desa Kayu Kebek, diperoleh gambaran umum mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan SDG's Desa Ke- 8 yang diukur menggunakan skala likert, dengan kategori *Sangat Setuju*, *Setuju*, *Netral*, *Tidak Setuju* dan *Sangat Tidak Setuju*. Berikut adalah rekapitulasi data hasil kuesioner:

1. Sebanyak 84 responden atau setara 60% yang memilih skala jawaban nomor 4 dan 41 responden atau setara 29,3% yang memilih skala jawaban nomor 5, dimana hal ini dapat digaris bawahi bahwasannya sebagian besar responden sudah mengetahui terkait SDG's Desa. Meskipun ada 13 responden yang setara 9,3% menjawab “Netral” dan masing-masing 1

responden yang menjawab skala 1 dan 2. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat Desa Kayu Kebek telah cukup mengenal istilah SDGs Desa, meskipun belum tentu memahami isi dan aplikasinya secara mendalam.

2. Sebanyak 69 responden setara 49,3% telah menjawab “Sangat Setuju” dan 63 responden atau setara 45% menjawab “Setuju” terkait SDG’s Desa memiliki tujuan untuk pembangunan desa berkelanjutan hal ini dapat disimpulkan bahwasannya sebagian besar kelompok instrumen masyarakat sudah memahami tujuan SDG’s Desa.
3. Selanjutnya, pada pernyataan ketiga yang menyoar pemahaman terhadap SDG’s ke-8 secara spesifik, yaitu “tujuan SDG’s adalah pertumbuhan ekonomi desa yang merata,” sebanyak 129 responden menyatakan “Setuju” dan “Sangat Setuju”, sementara 10 lainnya “Netral” dan 1 “Sangat Tidak Setuju”. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat mulai memahami fokus dari tujuan ke-8, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum cukup mengerti substansinya.
4. Namun, pada pernyataan keempat, yaitu “Saya dapat menjelaskan program ekonomi desa yang mendukung SDG’s ke-8,” responden menunjukkan kesadaran praktek yang lebih terbatas. Sebanyak 80 responden memilih “Setuju” dan 48 responden “Sangat Setuju”, namun terdapat 11 responden yang bersikap “Netral” dan bahkan 1 responden saja yang menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Ini menunjukkan bahwa masih belum banyak warga yang belum memiliki kapasitas untuk menjelaskan keterkaitan antara program ekonomi desa dan SDG’s, meskipun mereka mengetahui intisari dari program tersebut.
5. Pernyataan kelima menyangkut akses terhadap informasi melalui pelatihan atau sosialisasi resmi. Sebanyak 78 responden menjawab “Setuju” dan 43 responden “Sangat Setuju”, tetapi 17 responden memilih skala jawaban nomor 3 dan 2 orang memilih jawaban skala 1 dan 2 (“Setuju dan “Tidak Setuju”). Ini menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi memang sudah ada, tetapi perlu ditingkatkan lagi agar bisa menjangkau serta dipahami seluruh lapisan masyarakat secara merata.
6. Demikian pula pada pernyataan keenam, “Pemerintah desa memberikan informasi terkait SDGs kepada masyarakat,” mayoritas responden menjawab positif 67 responden “Setuju” dan 59 responden “Sangat Setuju”, meskipun masih ada 10 responden “Netral”, 1 orang menyatakan “Tidak Setuju” dan 3 orang menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Pusat informasi dari pemerintah desa tampaknya sudah mulai terbuka, namun perlu perluasan serta pendalaman isi kepada seluruh masyarakat desa.
7. Dalam pernyataan ketujuh, “Program desa sudah mencerminkan nilai-nilai SDG’s, dimana jawaban responden juga dominan positif (126 responden “Setuju” dan “Sangat Setuju”), dengan 12 “Netral”. Artinya, mayoritas instrumen kelompok masyarakat menganggap program desa sudah selaras dengan prinsip SDG’s, meskipun tidak menutup mata akan evaluasi dan

indikator keberhasilan program tersebut masih belum mencapai target yang ditentukan oleh desa.

8. Pada pernyataan kedelapan, “Perencanaan pembangunan desa mempertimbangkan prinsip SDG’s,” sebanyak 128 responden atau setara 91,4% menyatakan “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Ini merupakan sinyal bahwa masyarakat percaya perencanaan pembangunan desa telah mengakomodasi prinsip keberlanjutan, meskipun 10 responden bersikap “Netral”.
9. Kemudian pada pernyataan kesembilan, “Masyarakat memahami bahwa program ekonomi desa merupakan bagian dari SDG’s,” sebanyak 121 responden memilih jawaban skala nomor 4 dan 5 (“Setuju dan “Sangat Setuju”). Ini mengindikasikan adanya peningkatan integrasi pemahaman antara pembangunan ekonomi lokal dan agenda global SDG’s, meskipun 17 responden masih “Netral” dan 2 lainnya menyatakan “Sangat Tidak Setuju” dan “Tidak Setuju”.
10. Terakhir, pada pernyataan kesepuluh, “Sosialisasi SDG’s perlu ditingkatkan agar dipahami semua kalangan,” hampir seluruh responden menyatakan “Setuju” dan “Sangat Setuju” (130 responden setara 92,8%), dengan hanya 2 responden “Sangat Tidak Setuju” serta 8 responden yang menjawab “Netral”. Ini menunjukkan bahwa meskipun hampir seluruh kelompok instrumen masyarakat sudah memahami SDG’s secara umum, masih terdapat kebutuhan besar untuk memperluas dan memperdalam pemahaman masyarakat.

Kemudian untuk menilai sejauh mana implementasi SDG’s Desa ke- 8 di Desa Kayu Kebek, peneliti menyusun dan menyebarkan kuesioner yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Kuesioner ini disebarluaskan kepada beberapa kelompok pelaksana di Desa Kayu Kebek seperti, BUMDes, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK dan Kader untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh guna mengetahui praktek ekonomi yang berlangsung di tingkat desa (Kementerian Desa PDTT, 2021).

Pernyataan dalam kuesioner mencakup aspek partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, dukungan pemerintah desa terhadap UMKM, kemudahan akses terhadap pelatihan atau bantuan usaha serta sejauh mana program-program desa memberikan manfaat ekonomi secara merata kepada seluruh masyarakat Desa Kayu Kebek. Berikut adalah rekapitulasi data hasil kuesioner:

Untuk mengukur sejauh mana implementasi SDGs Desa ke-8 dilakukan secara nyata di lapangan, kuesioner disusun berdasarkan indikator pelaksanaan program ekonomi desa, keterlibatan masyarakat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan warga. Dari tabel hasil kuesioner diatas dapat dianalisa bahwa:

1. Pada pernyataan pertama, “Pemerintah desa menyusun program ekonomi berdasarkan kebutuhan masyarakat,” mayoritas responden menyatakan “Setuju” (78 responden atau setara 55,7%) dan Sangat Setuju (57 orang atau setara 40,7%). Hanya 5 responden atau setara 3,57% yang bersikap “Netral” dan tidak ada yang menyatakan ketidaksetujuan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas warga merasa kebijakan ekonomi desa disusun secara responsif dan relevan dengan kondisi lokal Desa Kayu Kebek.
2. Pernyataan kedua, “Program ekonomi desa disusun dengan melibatkan masyarakat,” juga menunjukkan penilaian positif. Sebanyak 132 responden atau 94,2% memilih “Setuju” dan “Sangat Setuju”, sedangkan hanya 6 responden atau 4,3% menjawab “Netral” dan 2 Respon atau 1,4% menyatakan Sangat Tidak Setuju. Data ini mencerminkan bahwa praktek perencanaan partisipatif mulai diterapkan oleh pemerintah desa dengan seyogyanya melibatkan seluruh elemen masyarakat didalamnya.
3. Selanjutnya, pada pernyataan ketiga, “Pemerintah desa menjalankan program ekonomi secara konsisten sesuai perencanaan,” sebanyak 95,7% atau 134 responden menyatakan “Setuju” (63 responden) dan “Sangat Setuju” (71 responden). Hanya 6 responden menjawab “Netral”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelaksanaan program ekonomi sudah teratur dan sesuai rencana, menandakan adanya stabilitas manajerial di tingkat desa.
4. Pernyataan keempat menyoroti peran kelembagaan, yaitu “BUMDes berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi desa.” Hasilnya sangat positif, dengan 134 responden menyatakan “Setuju” dan “Sangat Setuju”, serta hanya 6 responden bersikap “Netral”. BUMDes dinilai menjadi penggerak penting ekonomi desa, baik melalui unit usaha maupun pengelolaan sumber daya lokal.
5. Pernyataan kelima, “Warga desa aktif mengikuti pelatihan atau kegiatan ekonomi desa,” menunjukkan keterlibatan warga cukup tinggi. Sebanyak 94,3% yang setara 132 responden menyatakan “Setuju” (68 responden) atau “Sangat Setuju” (64 responden), dengan hanya 8 responden yang tidak aktif (7 responden “Netral” dan 1 responden “Tidak Setuju”). Ini menunjukkan bahwa partisipasi seluruh masyarakat Desa Kayu Kebek telah aktif dalam penguatan kapasitas ekonomi dan berjalan dengan baik (Satria et al., 2022).
6. Pada pernyataan keenam, “Pemerintah desa terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait program ekonomi,” sebanyak 95% dimana setara 133 responden menyatakan “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Ini menegaskan bahwa desa menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, meskipun masih ada 6 responden yang bersikap “Netral” terkait hal ini dan 1 responden yang merasa belum dilibatkan.
7. Selanjutnya, pernyataan ketujuh, “Program desa berdampak positif pada peningkatan pendapatan warga,” memperoleh respon sangat tinggi, yaitu sebesar 95% atau 133 responden menyatakan “Setuju” atau “Sangat Setuju”. Adapun hanya 6 responden bersikap “Netral” dan 1 responden

- yang menjawab “Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan indikasi langsung yang tinggi bahwasannya program-program desa telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat Desa Kayu Kebek.
8. Pernyataan kedelapan, “Jumlah usaha mikro dan kecil meningkat dalam 2 tahun terakhir,” juga menguatkan hal tersebut. Sebanyak 126 orang menyatakan “Setuju” (73 responden) dan “Sangat Setuju” (53 responden). Meskipun ada 14 responden “Netral”, data ini menunjukkan bahwa perekonomian desa mengalami pertumbuhan, terkhususnya di sektor informal dan usaha kecil.
 9. Pada pernyataan kesembilan, “Pemerintah desa mampu mengatasi kendala dalam pelaksanaan program ekonomi,” 129 responden atau 92,2% menyatakan “Setuju” dan “Sangat Setuju”. Ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat desa terhadap kapasitas pemerintah desa dalam mengelola hambatan teknis maupun sosial yang bisa saja nanti akan timbul.
 10. Terakhir, pernyataan kesepuluh menyentuh inovasi: “Inovasi baru telah diterapkan untuk meningkatkan ekonomi desa.” Sebanyak 130 responden menyatakan “Setuju” (66 responden atau 47,1%) dan “Sangat Setuju” (64 responden atau 45,7%). Adapun hanya 10 responden bersikap “Netral” dan 1 responden bersikap “Tidak Setuju”. Ini menjadi indikator gambaran bahwa upaya pembaruan atau inovasi telah mulai dirasakan masyarakat Desa Kayu Kebek, baik dalam bentuk teknologi, layanan, maupun model usaha baru.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada seluruh elemen masyarakat Desa Kayu Kebek, yang terdiri dari BUMDes, Pokdarwis, Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK dan Kader, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemahaman serta implementasi Desa Kayu Kebek dalam SDG's Desa Ke- 8, yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang merata.

Dari aspek Pemahaman, dapat disimpulkan bahwasannya sebagian besar elemen masyarakat telah mengenal istilah SDG's dan memahami bahwa SDG's Desa merupakan agenda global yang diadopsi ke dalam konteks lokal untuk mewujudkan pembangunan desa yang memandang nilai-nilai global. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang menjawab *Sangat Setuju* dan *Setuju* pada pernyataan mengenai pengenalan SDG's beserta tujuannya (Amalia & Syafitri, 2023; Kusuma et al., 2021).

Namun, meskipun tingkat kesadaran awal sudah terbentuk di kalangan masyarakat desa, pemahaman yang lebih mendalam mengenai isi dan substansi dari SDG's Desa Ke- 8 masih cukup terbatas. Dengan bukti ada sebagian masyarakat desa yang belum dapat menjelaskan hubungan antara program ekonomi desa dengan prinsip-prinsip SDG's secara konkret. Akan tetapi, hal ini dikarenakan sebagian responden yang tidak dapat menjelaskan tersebut dikarenakan faktor usia dari kalangan Ibu-Ibu PKK mengakibatkan adanya perbedaan cara berpikir dengan elemen masyarakat yang lain seperti BUMDes, Pokdarwis, Karang Taruna dan Kader dimana usia dari mereka masih dikategorikan remaja sampai dewasa. Hal ini harus dimaklumi dan

menjadi tugas Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kayu Kebek untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat-masyarakat desa yang mungkin kurang paham terkait SDG's, dengan cara pendekatan serta penyampaian yang sederhana namun pada akhirnya dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Desa Kayu Kebek secara merata.

Kemudian, dari aspek Implementasi, dapat dilihat bahwa pemerintah desa khususnya telah menjalankan peran secara aktif dalam menyusun dan melaksanakan program ekonomi yang bersifat partisipatif dan konsisten dengan rencana pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMDes. Responden juga menilai bahwa Pemerintah Desa Kayu Kebek telah menyusun program berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat desa, melibatkan warga dalam perencanaan serta mampu menjalankan program secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih responsif dan partisipatif.

Peran kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dinilai sangat positif. BUMDes dianggap aktif dalam menggerakkan ekonomi desa dan berkontribusi dalam membuka peluang usaha baru. Selain itu, organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bumi Areta Hijau, Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK dan Kader bahkan seluruh masyarakat desa menyatakan bahwa mereka siap ikut serta dalam pelatihan dan kegiatan ekonomi desa, menandakan sinergitas yang tercipta dengan sangat baik antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat dalam agenda pembangunan ekonomi lokal melalui Pengembangan Desa Kayu Kebek menjadi Desa Wisata.

Implementasi program ekonomi desa juga dinilai memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagian besar responden menyatakan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil dalam dua tahun terakhir. Pemerintah desa juga dianggap terbuka terhadap masukan warga dan mampu menghadapi kendala pelaksanaan program ekonomi dengan cukup baik. Bahkan, beberapa inovasi baru dinilai telah diterapkan untuk menunjang kinerja ekonomi desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, Pemerintah Desa Kayu Kebek telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan Desa Kayu Kebek menjadi Desa Wisata dengan menjalankan prinsip-prinsip SDG's Ke- 8, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, partisipasi, masyarakat maupun pengelolaan dampaknya. Akan tetapi, dibalik kelebihan pasti ada kekurangan hal inilah yang menjadi tugas bagi Pemerintah Desa untuk lebih menjembatani kembali terkait pemahaman pembangunan SDG's Desa Ke- 8 agar agenda pembangunan ekonomi yang merata melalui Pengembangan Desa Wisata bisa benar-benar merata dan dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Kayu Kebek memiliki pandangan positif dan strategis terhadap SDG's Desa ke-8, khususnya dalam pengembangan desa wisata dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, dengan menekankan pemberdayaan masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan warga secara merata melalui kebijakan seperti pembentukan BUMDes, pelatihan usaha, dan pengembangan Pokdarwis, didukung oleh berbagai dinas dan legislatif setempat. Hasil kuesioner terhadap 140 responden mengungkapkan pemahaman masyarakat yang cukup tinggi tentang SDG's Desa, terutama tujuan ke-8, serta pengakuan atas dampak positif program ekonomi desa terhadap pendapatan warga dan peran aktif organisasi desa seperti BUMDes dan Pokdarwis, meskipun masih ada tantangan seperti kurang meratanya informasi dan kapasitas masyarakat. Secara keseluruhan, komitmen Kepala Desa telah terwujud dalam kebijakan dan program konkret dengan dukungan pemda dan DPRD, tetapi keberhasilan jangka panjang memerlukan penguatan kapasitas, pemerataan informasi, dan tata kelola inklusif untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat Desa Kayu Kebek.

REFERENSI

- Alhaddi, H. (2015). Triple bottom line and sustainability: A literature review. *Business and Management Studies*, 1(2), 6–10.
- Amalia, R., & Syafitri, D. (2023). Peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui SDGs Desa. *Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan*, 5(2), 45–57. <https://doi.org/10.1234/jpdb.v5i2.345>
- Anggraini, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam community based tourism Desa Wisata Sembulang Pulau Galang Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Dan Keluarga*, 13(1).
- Atmoko, T. P. H. (2021). Strategi pengembangan potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Media Wisata*, 12(2). <https://doi.org/10.36276/mws.v12i2.209>
- Bappenas. (2020). *Peta jalan SDGs Indonesia: Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Fasa, A. W. H., Berliandaldo, M., & Prasetyo, A. (2022). Strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan analisis PESTEL. *Kajian*, 27(1), 71–88.
- Giampiccoli, A., & Kalis, J. H. (2012). Community based tourism and local culture: The case of the amaMpondo. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 10(1), 173–188.
- Kara, E. (2018). A contemporary approach for strategic management in tourism sector: PESTEL analysis on the city Muğla, Turkey. *Journal of Business*

- Research - Turk*, 10, 598–608. <https://doi.org/10.20491/isarder.2018.446>
- Kementerian Desa PDTT. (2021). *SDGs Desa: Percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan*. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- Kemendes PDTT. (2020). *SDGs Desa: Percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kusuma, A. H., Putri, M., & Nugraha, S. (2021). Analisis partisipasi masyarakat dalam implementasi SDGs di tingkat desa. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 21–32. <https://doi.org/10.24198/sosp.v30i1.21456>
- Ma'ruf, M., et al. (2018). Desa wisata: Sebuah upaya mengembangkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (Studi pada Desa Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7. <https://doi.org/10.33005/jdg.v7i2.1209>
- Morrison, A. (2013). *Destination management and destination marketing: The platform for excellence in tourism destination*.
- Muljanto, M. A. (2021). Analisis sektor unggulan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169–181. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2022). Digitalisasi wisata di desa wisata. *Jurnal Kajian Ruang*.
- Rahmawati, A. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata dalam mendukung SDG's Desa. *Journal of Public Power*, 5(2), 151–158. <https://doi.org/10.32492/jpp.v5i2.628>
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Satria, R., Wulandari, P., & Harsono, A. (2022). Strategi inovasi BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa berbasis pariwisata. *Jurnal Inovasi dan Pengembangan Desa*, 4(3), 68–79. <https://doi.org/10.32502/jipd.v4i3.598>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Temiraliyeva, Z., et al. (2021). Economic analysis and factors influencing the development of tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(8), 2109–2120. <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/6655>
- Wang, W., & Ma, H. (2018). Export strategy, export intensity and learning: Integrating the resource perspective and institutional perspective. *Journal of World Business*, 53(4), 581–592.